



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	4 (<i>empat</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional, Sekretaris Kementerian BUMN dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 26 Agustus 2020
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2019; dan 2. <i>Progress</i> Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kukuh S. Ahmad; 3. Sekretaris Kementerian BUMN, Susyanto; dan 4. Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Dody Widodo. beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Standardisasi Nasional, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian pada pukul 14.27 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 26 Agustus 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/08459/DPR RI/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2019 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2021.

II. KESIMPULAN

A. ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian untuk pengambilan keputusan pada Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 93,10% atau sebesar Rp3.368.036.653.338 (*Tiga Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp3.617.664.738.000 (*Tiga Triliun Enam Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan mendorong Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.
2. Komisi VI DPR RI mendukung upaya Kementerian Perindustrian untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (*enam*) bulan.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 (*dua belas*) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian untuk pengambilan keputusan pada Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian terkait realisasi Anggaran Tahun 2020 per 24 Agustus 2020 sebesar Rp989.640.107.000 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*) dari alokasi Anggaran sebesar Rp2.097.140.190.000 (*Dua Triliun Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 47,19% dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.

B. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 sebesar 98,32% atau sebesar Rp241.606.618.318 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp245.736.441.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) dan mendorong BSN untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.
2. Komisi VI DPR RI mendukung upaya Badan Standardisasi Nasional untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (*enam*) bulan.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 (*Sebelas*) Tahun sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2019, walaupun pada laporan keuangan Tahun 2015 sempat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2015.

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional atas realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 per 14 Agustus 2020 sebesar Rp115.163.493.657 (*Seratus Lima Belas Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp249.142.555.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) atau sebesar 46,22% dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.

C. SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Kementerian BUMN untuk pengambilan keputusan pada Rapat Kerja dengan Menteri BUMN terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 97,24% atau sebesar Rp202.523.377.661 (*Dua Ratus Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp208.269.902.000 (*Dua Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*) dan mendorong Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.
2. Komisi VI DPR RI mendukung upaya Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (*enam*) bulan.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Kementerian BUMN atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 (*Tiga Belas*) kali secara berturut - turut sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Kementerian BUMN untuk pengambilan keputusan pada Rapat Kerja dengan Menteri BUMN terkait realisasi anggaran Kementerian BUMN Tahun 2020 per 25 Agustus 2020 sebesar Rp101.703.965.390 (*Seratus Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp266.392.551.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) atau sebesar 38,18% dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.46 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA
A-189**